



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo No.38 Sidoarjo 61254

Telp (031) 8670360 - 2 Faksimile (031) 8670911 email : jatim@bpkp.go.id

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan Tahun 2020, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana Aksi Kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

- 1) Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
- 2) Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
- 3) Sarana untuk monitoring, evaluasi; dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sidoarjo, 11 September 2020

Kepala Perwakilan, *g*



Alexander Rubi Satyoadi
NIP. 19650226 198603 1 1001

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN Rp.Ribuan	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
						TW1	TW2	TW3	TW4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi	Rp. Jutaan	377	0	0	0	377	1	Pengawasan Penerimaan Daerah pada Pemerintah Daerah 2	Kompetensi Pengelola Pendapatan Daerah belum sesuai	-						
		2	Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi	Rp. Jutaan	753	0	0	0	753	1	Pengawasan Penerimaan Daerah pada Pemerintah Daerah 2	Pemerintah Daerah Tidak Mempunyai Data Potensi Penerimaan Daerah	5.933		PP	0	0	0	1
		3	Nilai efisiensi pengeluaran negara	Rp. Jutaan	2.246				2.246	1	ATT Percepatan Penanganan Covid 19	1. Keterbatasan akses dari pihak terkait 2. Belum tersedianya pedoman ATT 3. Keterbatasan akses untuk mendapatkan informasi	76.630	Inves 1	Lap	0	0	0	1
										2	ATT Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional		76.630	Inves 2	Lap	0	0	0	1
		4	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.	27.124	0	13.562	13.562	0	1	Audit Investigatif		26.030	Inves	Lap	0	0	0	1
										2	Audit PKKN		17.361	Inves 2	Lap	0	0	1	0
										3	Audit PKKN	17.361	Inves 2	Lap	0	1	0	0	
2	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	PP	1	0	-	-	1	1	Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol, Bendungan dan Perumahan)	Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak komprehensif/holistis	202.958	IPP 1	PP	7	0	0	7
										2	Pengawasan atas Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional pada Kementerian Perhubungan (Kereta Api, Pelabuhan, Bandara)		126.428	IPP 1	PP	2	2	0	4
										3	Pengawasan atas Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pemerataan Ekonomi (TORA dan Sertifikasi Lahan)		32.478	IPP 1	PP	0	0	0	2
										4	Pengawasan dalam rangka Pengawasan Proyek Strategis Nasional		57.988	IPP 1	PP	2	0	0	2
										5	Pengawasan Lintas Sektoral Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda mendukung Pertumbuhan Ekonomi		16.239	IPP 1	PP	0	0	0	1

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
						Rp.Ribuan													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										6	Pengawasan Lintas Sektoral atas Program Prioritas (PP) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.		16.239	IPP 1	PP	0	1	0	0
										7	Dukungan Pengawasan Lintas Sektoral atas Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BKPM, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan		11.239	IPP 1	PP	0	0	0	1
										8	Pengawasan Lintas Sektoral atas Program Prioritas Nasional Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja.		16.239	IPP 1	PP	0	1	0	0
										9	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan		11.239	IPP 1	PP	0	0	0	1
										10	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Dan Terbarukan (EBT)		11.239	IPP 1	PP	0	0	0	1
		2	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	KP	7	0	-	-	1	1	Pengawasan Lintas Sektoral atas Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi	Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak komprehensif/ holistik	17.988	IPP 2	PP	0	0	0	1
		3	Jumlah KP yang diawasi	KP	7	0	0	0	7	1	Monitoring Program Lintas Sektoral Daerah Prioritas Nasional Bidang Pendidikan	Database Dapodik yang tidak valid	7.538	APD	PP	0	0	1	0

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
						Rp.Ribuan	TW1	TW2	TW3				TW4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										2	Reviu Proyek Strategis Nasional PLTSa Benowo	Perubahan spesifikasi pekerjaan yang tidak diatur dalam perjanjian	28.121	APD	PP	1	1	0	0
										3	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah tidak punya Sistem Pengumpulan Data Kinerja	7.538	APD	PP	0	0	1	0
										4	Evaluasi Program Prioritas Nasional Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan terkait Pendampingan pada Proses Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa	Keterlambatan pelaporan	7.538	APD	PP	0	0	1	0
										5	Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pada Pemerintah Daerah	Penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai ketentuan	7.538	APD	PP	0	1	0	0
										6	Pengawasan Kebijakan Fiskal/Dana Transfer Pemda 1	Keterlambatan Proses PBJ	5.933	APD	PP	0	0	0	1
										7	Pengawasan atas Hasil Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak komprehensif/ holistik	83.416	IPP 2	PP	0	4	0	1
		4	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	3	1	0	0	2	1	Reviu Pembangunan Fly Over Dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Tahun 2020	Stakeholder terlambat menyampaikan data	25.760	AN 1	Lap	1	0	0	1
										2	Reviu Pembangunan Jalan Tol Pandaan - Malang Tahun 2020		18.288	AN 1	Lap	1	0	0	1
										3	Reviu Tata Kelola PSN-SPAM Triwulan I Tahun 2020 pada Proyek SPAM Umbulan		7.330	AN 2	Lap	1	0	0	0
										4	Reviu Tata Kelola PSN-SPAM Triwulan IV Tahun 2020 pada Proyek SPAM Umbulan		7.330	AN 2	Lap	0	0	0	1

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
						TW1	TW2	TW3	TW4				Rp.Ribuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	75	0	0	0	75	1	HKP	Kurangnya komitmen dari para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul	7.770	Investigasi	Lap	0	0	0	1
3	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1	1	0	0	0	1	melaksanakan Asesmen GCG PT Industri Kereta Api (Persero) Tahun 2019	Tim tidak dapat menemukan AOI/kelemahan penerapan GCG	16.510	AN 1	Lap	1	0	0	0
		2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	33	0	1	0	0	1	Evaluasi Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM Tahun Buku 2019	Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak selesai tepat waktu	245.096	AN 2	Lap	0	1	0	0
		3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat		2	0	0	0	2	1	Monitoring atas Peran BLU dan BLUD dalam mendukung Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan pada RSUD A	Stakeholder terlambat menyampaikan data	6.040	AN 2	Lap	0	0	0	1
										2	Monitoring atas Peran BLU dalam mendukung Program Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek Inovasi pada PTN A	Stakeholder terlambat menyampaikan data	6.040	AN 2	Lap	0	0	0	1
		4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	1	0	0	0	1	1	Monitoring atas Peran BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan, dan Penguatan Kewirausahaan dan UMKM di Wilayah Provinsi Jawa Timur	Stakeholder terlambat menyampaikan data	6.040	AN 2	Lap	0	0	0	1
4	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembanguan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	100	0	0	0	100	1	Pemberian Keterangan Ahli	Jadual PKA tidak dapat diprediksi	607	Inves 2	Lap	1	0	0	0
										2	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	1	0	0	0
										3	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	1	0	0	0
										4	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	1	0	0	0
										5	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	1	0	0	0
										6	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	1	0	0	0
										7	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	0	1	0	0
										8	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	0	1	0	0
										9	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	0	1	0	0
										10	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	0	1	0	0
										11	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	0	1	0	0

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
						TW1	TW2	TW3	TW4				Rp.Ribuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										12	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	0	1	0	0
										13	Pemberian Keterangan Ahli		607	Inves 2	Lap	0	1	0	0
		2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	70	70	0	0	0	1	Forum Investigasi	Keterbatasan anggaran	22.790	Inves 2	Lap	1	0	0	0
										2	Masyarakat Pembelajar anti Korupsi (MPAK)	Kurangnya komitmen dari stakeholders dalam melaksanakan pencegahan korupsi	1.680	Inves 2	Lap	0	1	0	0
										3	Fraud Control Plan		14.450	Inves 2	Lap	1	0	0	0
										4	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	1. Kurangnya komitmen dari stakeholders dalam melaksanakan	3.750	Inves 1	Lap	0	0	0	1
										5	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	stakeholders dalam melaksanakan	3.750	Inves 2		0	0	0	1
										6	RS Ketahanan Pangan	1. Keterbatasan akses untuk mendapatkan informasi 2. Belum tersedianya pedoman RS Ketahanan Pangan	6.578	Inves 1	Lap	0	0	0	1
										7	RS Antarmoda		6.500	Inves 2	Lap	0	0	0	1
5	Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1	Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP Level 3	APIP	9	5	2	0	2	1	Bimbingan Teknis PK APIP Level 3	1. Rendahnya komitmen Pimpinan APIP dan Daerah.	59.150	P3A	pp	4	3	1	0
										2	Penjaminan Kualitas	2 Rendahnya kompetensi SDM APIP sehingga tidak mampu memenuhi KPA kapabilitas APIP Level 3	29.600	P3A	pp	1	1	0	1
										3	Laptri APIP		5.800	P3A	pp	1	1	1	1
										4	Peningkatan kompetensi SDM		53.503	P3A	pp	1	0	0	1
										5	Evaluasi penerapan JFA pada Pemda		2.505	P3A	pp	1	0	0	0
										6	Workshop Pimpinan/Kada		40.000	P3A	pp	0	0	0	1
										7	Monitoring saran TL dan AOI Level 3		9200	P3A	pp	0	0	0	1
		2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP Level 3	Pemda	33	31	0	0	2	1	Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas SPIP	Dokumentasi atas bukti yang tidak memadai	149.636	APD	pp	9	0	0	0
										2	Bimtek Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Penanganan Covid 19	Pemerintah Daerah Belum menyusun Risiko atas Penanganan Covid	16.626	APD	PP	0	0	1	0
										3	QA Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Penanganan covid 19		16.626	APD	PP	0	0	1	0
										4	Bimtek SPIP PBJ Penanganan covid 19	PBJ belum didukung dengan kewajaran Harga	16.626	APD	pp	0	1	0	0
		3	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI Level 3	Pemda	2	0	0	0	2	1	Bimtek/Asistensi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah Belum Menyusun Pedoman MR	3.000	APD	PP	2	0	0	1

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
						Rp.Ribuan													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										2	Bimtek Manajemen risiko atas penanganan covid	Pemerintah Daerah belum menyusun register risiko atas penanganan Covid	9.189	APD	PP	0	0	1	0
		4	Persentase Jumlah Penda yang Akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	%	3,51	0	3,51	0	0	1	Bimtek/Asistensi/Fasilitasi Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah belum menyusun ASB	11.866	APD	PP	0	0	0	2
										2	Bimbingan Teknis Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Reviu tidak didukung KKR yang lengkap	5.960	APD	PP	1	0	0	0
										3	Bimtek Implementasi Aplikasi SIMDA Next Generation (Next-G)	Aplikasi SIMDA Next Generation belum update	29.665	APD	PP	3	2	0	0
										4	Bimtek/Asistensi Penatausahaan Keuangan terkait Covid-19	Bukti pertanggungjawaban belum lengkap	9.189	APD	PP	0	0	0	1
											Monitoring Perwakilan BPKP atas Realisasi Anggaran Pemda terkait Covid-19	Data realisasi anggaran dari Pemerintah Daerah terlambat diterima	9.189	APD	PP	0	0	0	1
		5	Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1	0	0	0	1	1	Evaluasi atas Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengatasi dampak COVID-19	Database penerima bantuan belum tersedia	43.830	APD	PP	0	0	2	0
										2	Audit Pengelolaan bantuan sosial bersumber dana APBD dalam rangka penanganan COVID-19	Penerima Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran	29.448	APD	PP	0	0	2	0
										3	Pendampingan APIP Daerah atas pengawasan PBJ penanganan covid-19 Bidang Kesehatan dari APBD	SDM Inspektorat belum mendapatkan diklat/pelatihan PBJ yang memadai	9.189	APD	PP	0	0	1	0
		6	Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	%	45					1	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	Penggunaan Dana Desa tidak sesuai prioritas	77.129	APD	PP	7	0	6	0
										2	Bimtek/Asistensi Peningkatan Kualitas APBDesa	Tim evaluator RAPBDes belum didukung SDM yang kompeten	11.866	APD	PP	1	1	0	0
										3	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penggunaan Dana Desa tidak sesuai prioritas	11.866	APD	PP	2	0	0	0
										4	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 atas Program padat karya tunai desa & penyaluran bansos	BLT DD tidak tepat sasaran	259.980	APD	PP	0	0	6	0

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN Rp.Ribuan	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4	
						TW1	TW2	TW3	TW4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
										5	Workshop Hasil Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 program Penyaluran BLT	Tidak semua kepala desa mengikuti workshop	645.952	APD	PP	0	0	8	0	
		7	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	Desa	1	0	0	0	1	1	Sosialisasi Aplikasi SISWASKEUDES di BPKP Pusat	Belum semua Pemerintah Daerah mengimplementasikan Siskeudes secara online	5.933	APD	PP	1	0	0	0	
										2	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan SISKEUDES	Pergantian Operator Desa	17.799	APD	PP	3	0	0	0	
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan	1	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100	100	100	100	100	1	Penyusunan RKA sesuai jadwal	RKA terlambat disampaikan ke Rokeu dan pihak terkait	70.000	Kasubbag Keuangan	Keg	0	2	2	1	
										2	berkoordinasi dengan Rendal Pusat (Rokeu, Roum)				Keg	0	2	2	1	
										3	Supervisi atasan langsung				Keg	0	2	2	1	
		2	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	86	86	86	86	86	86	1	Monitoring skor IKPA	Skor IKPA mengalami penurunan	70.000	Kasubbag Keuangan	Keg	1	1	1	1
											2	Melakukan perbaikan atas skor IKPA yang kurang				Keg	1	1	1	1
											3	berkoordinasi dengan KPPN, Kanwil DJPB, dan Biro Keuangan apabila terdapat kendala pengelolaan keuangan terkait IKPA				Keg	1	1	1	1
		3	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90	90	90	90	90	90	1	Membuat time schedule penerbitan SPM	SPM terlambat diterbitkan	70.000	KTU	Keg	1	0	0	0
											2	Monitoring atas penerbitan SPM				Keg	1	1	1	1
											3	Supervisi atasan langsung				Keg	1	1	1	1
				4	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	%	100	0	100	0	100	1	Penyusunan Lapkeu sesuai jadwal	Lapkeu terlambat disampaikan ke Rokeu dan pihak terkait	70.000	Kasubbag Keuangan	Keg	0	1	0
2	berkoordinasi dengan Rendal Pusat (Rokeu, Roum) dan Inspektorat BPKP terkait penyusunan Lapkeu											Keg	1	1	1	1				

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN Rp.Ribuan	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
						TW1	TW2	TW3	TW4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										3	berkoordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPB terkait penyusunan Lapkeu			Keg	1	1	1	1	
		5	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	1	Pengadministrasian BMN sesuai regulasi dan SOP	Administrasi BMN tidak tertib	60.550	Kasubag Umum	Keg	1	1	1	1
										2	berkoordinasi dengan Rendal Pusat (Rokeu, Roum)			Keg	1	1	1	1	
										3	berkoordinasi dengan KPKNL			Keg	1	1	1	1	
														Keg					
		6	Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai	80	80	80	80	80	1	Sosialisasi dan implementasi SAKIP	Kekurangpedulian pegawai terhadap ZI SAKIP	10.000	KTU	Keg	0	0	1	1
									2	Monitoring pelaksanaan SAKIP	Keg				0	0	1	1	
									3	Evaluasi atas skor SAKIP Perwakilan	Lap				0	0	1	1	
		7	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level	3	3	3	3	3	1	Self assessment Maturitas	Kekurangpedulian pegawai terhadap SPIP	10.000	KTU	Keg	0	0	1	1
									2	Identifikasi dan perbaikan Aol Maturitas SPIP	Keg	0			0	1	1		
									3	Evaluasi atas skor Maturitas	Lap	0			0	1	1		
		8	Indeks Kualitas Layanan Ketata Usahaan Unit Kerja	Indeks	70	70	70	70	70	1	Melakukan survey kualitas layanan ke seluruh pegawai	Hasil survey tidak mencerminkan kondisi objektif	10.000	KTU	Keg	0	0	0	1
									2	Monitoring pelaksanaan survey	Keg				0	0	0	1	
									3	Evaluasi hasil survey	Lap				0	0	0	1	
		9	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	75	75	75	75	75	1	Melakukan sosialisasi dan penerapan ZI	Kekurangpedulian pegawai terhadap ZI	10.000	KTU	Keg	0	0	1	0
									2	Monitoring pelaksanaan ZI	Keg	0			0	0	1		
									3	Evaluasi atas skor ZI	Lap	0			0	0	1		
		10	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks	70	70	70	70	70	1	Melakukan survey kualitas layanan ke seluruh pegawai	Hasil survey tidak mencerminkan kondisi objektif	10.000	KTU	Keg	0	0	0	1
									2	Monitoring pelaksanaan survey	Keg	0			0	0	1		
									3	Evaluasi hasil survey	Keg	0			0	0	1		

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
						Rp.Ribuan													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		11	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100	100	100	100	100	1	Pengumpulan Bahan dan Penyusunan dokumen Kenaikan Gaji Berkala	Dokumen pendukung kenaikan gaji berkala kadang tidak dilengkapai	10.000	Kasubbag Kepeg.	Keg	1	1	1	1
										2	Penyelesaian kenaikan pangkat terpadu semester I dan II	Dukumen pendukung usulan kenaikan pangkat lengkap			Lap	1	0	1	0
										3	Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan program pelatihan mandiri	Pengumpulan dokumen PPM tidak tepat waktu	10.000	Kasubbag Kepeg.	Lap	1	1	1	1
										4	Pengumpulan bahan dan pengajuan diklat	Pengawai yang diajukan sebagai peserta diklat tidak memenuhi persyaratan			Surat	1	1	1	1
		12	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	1	Pengumpulan bahan dan penyusunan dokumen pengangkatan jabatan dan penghentian pegawai	Hasil rekapitulasi evaluasi dupak tidak akurat dan dukumen pendukung tidak lengkap	70.000	Kasubbag Kepegawai an	Lap	12	1	1	1
										2	Pengumpulan bahan dan penyusunan dokumen GDN	Pelaporan GDN tidak akurat			Lap	1	1	1	1
										3	Pengumpulan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM	Hasil analisis beban kerja dan formasi pegawai tidak menggambarkan beban kerja yang sesungguhnya			Lap				1
										4	Pelaksanaan dan penyusunan laporan kehumasan	Dokumen pendukung laporan kehumasan tidak tepat waktu			Lap	1	1	1	1